|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Sulteng Post | KasubaudSulteng II |
| Hari, tanggal | : | Senin, 22 Desember 2014 |
| Keterangan | : | Kepala Desa (Kades) dan aparat desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga, mogok kerja karena tidak dibayar gaji |
| Entitas | : | Parimo |

SULTENG POST – Kepala Desa (Kades) dan aparat desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga, betul-betul mogok kerja dan tidak lagi melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti biasanya. Mereka melakukan aksi mogok terhitung mulai Senin (22/12) hingga apa yang menjadi keinginan mereka dipenuhi.

Aksi mogok kerja yang dilakukan Kades dan aparat desanya tersebut, merupakan bentuk kekecewaan terhadap camat Mepanga yang tidak menandatangani Surat Permohonan Pembayaran (SPP) gaji, dengan alasan yang tidak mendasar.

Aep Saifudin, Kades Sumber Agung mengatakan, jika sebelumnya ia hanya mengancam, namun pihaknya merasa perlu untuk melakukan aksi mogok kerja itu. Sebab, pihaknya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan camat Mepanga.

Apalagi kata dia, telah banyak upaya yang dilakukan agar camat Mepanga mau menandatangani SPP gajinya dan aparat desa Sumber Agung lainnya. Bahkan, keinginan bersilaturahmi telah dilakukan, hanya saja camat sedang berada diluar daerah.

“Kemarin saya, KAU dan Kepala Dusun sudah mendatangani rumah camat seperti saran Sekdes Sumber Agung untuk bersilaturahmi. Tetapi camat sedang berada di Jakarta,” kata Kades Sumber Agung kepada Sulteng Post, Senin (22/12).

Menurut dia, agar gaji aparat desa selama tiga bulan dapat terbayarkan, pihaknya telah mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan pihak BPMD dan Wakil Bupati Parmout, tetapi tidak bisa memberikan solusi, dan memang tandatangan Camat dibutuhkan.

Karena itu tambahnya, kurang lebih 12 orang KAU dan Dusun melakukan aksi mogok kerja, hingga gaji yang menjadi hak aparat desa tersebut dibayarkan. Sehingga, yang memberikan pelayanan di kantor Desa Sumber Agung hanya Sekdes saja. “Kami mulai lakukan mogok kerja hari ini (kemarin) hingga gaji kami dibayarkan. Selain itu, biar dapat perhatian dari pemerintah,” kata dia.

Dia menuturkan, alasan camat Mepanga yang tidak mau menandatangani SPP gaji dinilai berlebihan. Sebab, pasar desa Sumber Agung sesungguhnya hanya beroperasi selama dua jam saja, pada sore hari dan pagi harinya berjualan di pasar Sentral Mepanga, dengan jarak kurang lebih dua kilometer.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Parmout, Adnyana Wirawan yang ditemui terpisah mengatakan, pihaknya menyayangkan tindakan camat Mepanga, yang tidak mau menandatangani SPP gaji Kades dan aparat desa Sumber Agung.

Menurut dia, seharusnya camat tidak menyuruh para aparat desa mengurus sendiri gaji mereka di kabupaten, sebab hal itu merupakan tugas dan fungsi camat. “Apa tugas dan fungsi Camat? mengapa menyuruh aparat desa mengurusnya sendiri di kabupaten, sementara tandatangannya dibutuhkan,” tandasnya.

Dia menuturkan, camat merupakan perwakilan pemerintah daerah di kecamatan. Seharusnya mencarikan solusi dari permasalahan yang ada, bukan mempersulit masyarakat.

Pihaknya khawatir, jika masalah ini dibiarkan terus, akan menimbulkan permasalahan yang jauh lebih berat, lebih dari persoalan mogok kerja. “Kalau soal pedagang yang mau dipindahkan sudah ada instansi yang tangani. Jangan dikaitkan dengan persoalan gaji kades dan aparat desa,”ujarnya. OPPIE